

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya tugas pemerintah kepada rakyatnya adalah memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Peran pemerintah memang sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat yang berkembang. Apapun perubahan yang terjadi terhadap peranan pemerintah tidak akan merubah fungsi pemerintah itu sebagai pelayan publik atau masyarakat. Salah satu aspek yang paling penting dalam melaksanakan fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dari berbagai aktivitasnya dan untuk itu pemerintah membentuk sistem administrasi agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta bisa menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik.

Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat antara lain Pelayanan Administratif, Pelayanan Barang dan Pelayanan Jasa. Pelayanan Pemerintah akan efektif apabila pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada, didukung dengan fasilitas yang memadai serta dilaksanakan oleh tenaga yang profesional dan berkompeten. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pelayanan prima pemerintah terlebih dahulu harus mempersiapkan sumber daya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional dan berkompeten.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan pendidikan formal yang menjadi prioritas organisasi dapat di laksanakan melalui program izin belajar dengan memperhatikan kebutuhan Organisasi/SKPD sehingga akan terwujud peningkatan keahlian dan profesionalitas PNS dalam bidang ilmu/keahli tertentu yang dibutuhkan bagi perkembangan dan kemajuan negara khususnya Pemerintah Provinsi Riau, meskipun diikat dengan sumpah janji jabatan dalam mengemban amanah dan tanggung jawab sebagai pelayan publik, PNS masih punya peluang untuk menimba ilmu di jalur pendidikan formal ataupun non formal.

Sejalan dengan tuntutan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil dalam menangani tugas yang semakin kompleks, telah mendorong inisiatif dan kemauan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada sekolah atau perguruan tinggi baik yang dibiayai pemerintah daerah maupun dengan biaya sendiri (swadana). Keberadaan perguruan tinggi memegang peranan penting dalam pengembangan sumberdaya aparatur pemerintah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Izin Belajar adalah Izin yang diberikan kepada PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan, sedangkan dalam Peraturan Gubernur Riau No 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Keterangan Belajar Bagi Aparatur Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada BAB V pasal 17 ayat (1) menyebutkan izin belajar didasarkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja organisasi.

Kualitas atau profesionalisme penyelenggaraan Izin Belajar merupakan tuntutan yang harus segera direspon. Profesionalisme penyelenggaraan Izin Belajar secara signifikan dapat mempengaruhi kualitas sumber daya aparatur suatu instansi. Oleh karena itu, upaya-upaya konstruktif dalam mengembangkan Sumber Daya Aparatur harus dilakukan secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan. Dengan demikian, harapan akan tersedianya aparatur pemerintah yang profesional dapat tercapai.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai instansi pelaksana memiliki peranan penting dalam pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar kepada PNS yang melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi, yakni harus lebih meneliti keterkaitan antara kebutuhan pendidikan yang diminati dengan tugas pokok yang dimiliki instansi yang bersangkutan. Hal ini tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 802/303/SJ tanggal 09 Januari 1990 hal Petunjuk Pemberian Izin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belajar Pegawai Negeri Sipil poin 3.b. yang menyatakan dalam pemberian Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan harus dipertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada pasal 10 bagian kedua yaitu: Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier mempunyai tugas diantaranya: memproses penerbitan Surat Izin Belajar, mengelola administrasi pelaksanaan kegiatan Tugas Belajar, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pada peraturan gubernur tersebut dijelaskan bahwa Gubernur Riau menugaskan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam hal pemberian izin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dimana tugas itu di laksanakan oleh Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai. Setiap tahun selalu ada PNS mengajukan izin belajar baik itu program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Keterangan Belajar Bagi Aparatur Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah dijelaskan dengan detail tata cara dan syarat pengajuan izin belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pada pasal 19 menerangkan tata cara pengajuan izin belajar yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Permohonan izin belajar diajukan setelah PNS mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru pada suatu program pendidikan di institusi pendidikan yang dipilih
2. Sebelum mengajukan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana/ program izin belajar BKPPD
3. Terhadap pengajuan izin belajar yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan Surat Izin Belajar
4. Kelalaian dalam pengajuan permohonan izin belajar sebagaimana pada ayat (1) berakibat tidak dapat diterbitkan izin belajar.

Pasal 20 tentang persyaratan izin belajar yaitu:

1. Persyaratan izin belajar meliputi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil bukan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
 - d. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - f. Mengajukan permohonan kepada atasan tempat bekerja dan seterusnya BKPPD;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Disiplin ilmu yang diambil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tempat bekerja;
 - h. Pendidikan diikuti diluarjam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari
 - i. Bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan; dan
 - j. Tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan izin belajar PNS, Kepala SKPD membuat usulan izin belajar ke BKPPD dengan melampirkan:
- a. Surat Keterangan Lulus Seleksi dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta;
 - b. Surat Keterangan Akreditasi Program Studi yang diambil minimal B;
 - c. Pangkat minimal III/a untuk izin belajar S2/S3 dan minimal II/a untuk izin belajar D3/D4/S1;
 - d. Surat Pernyataan tidak meninggalkan tugas sehari-hari;
 - e. Surat Pernyataan tidak menuntut biaya pendidikan;
 - f. Surat hasil konsultasi dari BKPPD;
 - g. Foto copi ijazah/ transkrip nilai pendidikan terakhir;
 - h. SK pangkat pertama dan terakhir;
 - i. SKP;
 - j. Daftar Riwayat Hidup; dan Pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada peraturan tersebut sudah dijelaskan sejelas-jelasnya tata cara dan persyaratan pengajuan izin belajar bagi PNS. Namun pada prakteknya masih banyak PNS yang tidak mengindahkan peraturan tersebut, tidak sedikit diantara mereka yang tidak memenuhi persyaratan dalam pengajuan izin belajar sehingga hal itu menjadi kendala dan masalah dalam proses penerbitan izin belajar.

Tabel 1.1
Data PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang Sudah menerima Izin Belajar

No	Tahun Bulan	2015	2016	2017
1	Januari		26	36
2	Februari		11	19
3	Maret		15	16
4	April	27	14	16
5	Mei	18	6	2
6	Juni	5	10	4
7	Juli	3	6	2
8	Agustus	16	12	18
9	September	16	5	11
10	Oktober	6	26	21
11	November	10	20	17
12	Desember	11	10	20
	Jumlah	112 orang	161 orang	182 Orang

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2017

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya PNS yang memperoleh izin belajar pada tahun 2017 meningkat cukup tinggi dimana pada tahun 2015 hanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjumlah 112 (seratus dua belas) orang, tahun 2016 sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) orang sedangkan di tahun 2017 sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) orang (*lampiran terlampir*). Izin belajar yang diberikn kepada PNS itu bertempat pada berbagai program studi, berbagai tingkatan pendidikan serta berbagai universitas yang masih terdalam di dalam daerah, karena dalam peraturannya ruang lingkup pemberian izin belajar hanya didalam daerah saja. Hal itu membatasi keberagaman bidang studi maupun universitas yang akan menjadi pilihan bagi PNS dalam melanjutkan pendidikannya dengan program izin belajar.

PNS yang mengajukan permohonan izin belajar masih ada diantara mereka yang mengajukan izin belajar tanpa berkoordinasi ke BKD, tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan juga ada diantara mereka yang memperbaharui izin belajarnya pada saat akan mengikuti usulan kenaikan pangkat.

Ada diantara mereka yang mengajukan izin belajar tanpa berkonsultasi terlebih dahulu ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau sehingga tidak memahami jurusan linear dan tidak linear dan ada diantara mereka yang terlanjur mengikuti tes pada jurusan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tempat bekerja sehingga izin belajarnya tidak bisa diproses, mereka tidak memahami betul aturan dan peraturan tersebut. Serta masih ada PNS yang mengajukan izin belajar pada program studi yang berakreditasi C. Pelanggaran atau kelalaian dalam pengajuan permohonan izin belajar tersebut berakibat izin belajar PNS yang bersangkutan tidak bisa diproses atau tidak bisa diterbitkan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Daftar Nominatif Usulan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau Tahun 2015 Dengan Akreditasi C

No	Instansi	Pendidikan Terakhir	Universitas	Program Studi
1	UPT. RS Petala Bumi Dinas Kesehatan Provinsi Riau	D-III Keperawatan Purna Bhakti Persada Batu Sangkar	STIKes Payung Negeri Pekanbaru	Pendidikan S-1 Keperawatan
2	UPT. RS Petala Bumi Dinas Kesehatan Provinsi Riau	D-III Keperawatan Akper Muhammadiyah Pekanbaru	STIKes Payung Negeri Pekanbaru	Pendidikan S-1 Keperawatan
3	Dinas Sosial Provinsi Riau	SMP Sosial Negeri Ilir Barat I Palembang	STIE RIAU	S-1 Manajemen
4	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau	SMU Negeri 7 Pekanbaru	STIE RIAU	S-1 Manajemen
5	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	D-III Gizi Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan Riau	STIKes Tuanku Tambusai Pekanbaru	S-1 Gizi
6	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	D-III Gizi Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan Riau	STIKes Tuanku Tambusai Pekanbaru	S-1 Gizi
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau	D-IV Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Universitas Islam Riau	S-2 Ilmu Administrasi
8	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	SMU Negeri 12 Pekanbaru	STIE RIAU	S-1 Ilmu Ekonomi
9	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau		Universitas Lancang Kuning	S-1 Administrasi Negara
10	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	SMK	Universitas Pasir Pangaraian (UPP)	S-1 Agribisnis
11	Dinas Pendapatan Provinsi Riau	SMEA Negeri Rengat	STIE Indragiri	S-1 Manajemen
12	Badan Penghubung Provinsi Riau	SMK Pusaka I Duren Sawit Jakarta Timur	STIE Pertiwi	S-1 Manajemen
13	Dinas Pekerjaan Umum	SMK Tunas Karya Pekanbaru	Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru	S-1 Teknik Sipil



			(STTP)	
14	UPT. Pelatihan Penelitian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau	D-III Kebidanan Akademi Keperawatan Malahayati Medan	STIE RIAU	S-1 Manajemen
15	Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Setda Provinsi Riau	D-III Ilmu Perpustakaan Universitas Lancang Kuning	Universitas Lancang Kuning	S-1 Ilmu Perpustakaan
16	Dinas Kesehatan Provinsi Riau (UPT. RS Petala Bumi)	D-III Ilmu Keperawatan AKPER Pekanbaru	STIKes Al-Insyirah Pekanbaru	S-1 Ilmu Keperawatan
17	Dinas Kesehatan Provinsi Riau (UPT. RS Petala Bumi)	D-III Ilmu Keperawatan AKPER Pekanbaru	STIKes Al-Insyirah Pekanbaru	S-1 Ilmu Keperawatan
18	Dinas Kesehatan Provinsi Riau (UPT. RS Petala Bumi)	D-III Ilmu Keperawatan AKPER Pekanbaru	STIKes Al-Insyirah Pekanbaru	S-1 Ilmu Keperawatan
19	Dinas Kesehatan Provinsi Riau (UPT. RS Petala Bumi)	D-III Ilmu Keperawatan AKPER Pekanbaru	STIKes Al-Insyirah Pekanbaru	S-1 Ilmu Keperawatan
20	Dinas Kesehatan Provinsi Riau (UPT. RS Petala Bumi)	D-III Ilmu Keperawatan AKPER Pekanbaru	STIKes Al-Insyirah Pekanbaru	S-1 Ilmu Keperawatan
21	Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau	SMU Negeri 1 K.Mudik Jambi	STIE AKBAR	S-1 Manajemen
22	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	S-1 Keperawatan STIKes Maharatu Pekanbaru	STIKes PMC	S-1 Ners
23	Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau	D-III Keperawatan DR. Dumai	STIKes Payung Negeri Pekanbaru	S-1 Ilmu Keperawatan
24	Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau	D-III Keperawatan Politeknik Kesehatan Riau	STIKes Payung Negeri Pekanbaru	S-1 Ilmu Keperawatan
25	Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau	D-III Keperawatan B.A.S Balimbing Medan	STIKes Payung Negeri Pekanbaru	S-1 Ilmu Keperawatan
26	Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau	D-III Keperawatan Payung Negeri Pekanbaru	STIKes Payung Negeri Pekanbaru	S-1 Ilmu Keperawatan
27	Rumah Sakit Jiwa	D-III Keperawatan	STIKes Payung	S-1 Ilmu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	Tampam Provinsi Riau	Payung Negeri Pekanbaru	Negeri Pekanbaru	Keperawatan
28	Rumah Sakit Jiwa Tampam Provinsi Riau	D-III Keperawatan Yayasan Baiturrahmah Sumatra Barat	STIKes Payung Negeri Pekanbaru	S-1 Ilmu Keperawatan
29	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	S-1 Geografi Fisik Universitas Gadjah Mada Jogjakarta	Univversitas Islam Riau	S-2 Ilmu Pemerintahan
30	Rumah Sakit Jiwa Tampam Provinsi Riau	D-III Keperawatan Universitas Sumatra Utara	STIKes Payung Negeri Pekanbaru	S-1 Ilmu Keperawatan
31	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Riau	Madrasah aliyah Negeri Kampar		
32	Dinas Pendapatan Provinsi Riau	S-1 Hukum Universitas Pancasila Jakarta		
33	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	Spesialis Patologi Klinik Universitas Andalas		
34	BPAD Provinsi Riau	D-III Pustakawan Institut Pertanian Bogor	Universitas Lancang Kuning	S-1 Ilmu Perpustakawan
35	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	S- 1 Kedokteran Gigi	STIKES Hang Tuah Pekanbaru	S- 2 Ilmu Kemasyarakatan

Sumber : *Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2017*

Tabel diatas menunjukkan beberapa PNS yang tidak memahami dan mematuhi aturan dalam pengajuan izin belajar, masih ada PNS yang mengikuti izin belajar tanpa berkoordinasi dengan BKD, bahkan ada juga diantara mereka yang mengajukan izin belajar pada program studi yang berakreditasi C. Ketidak disiplin PNS dalam pengurusan izin belajar tersebut menyebabkan usulan izin belajar yang bersangkutan tidak dapat diproses. Sementara izin belajar yang belum memenuhi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

syarat belum bisa diproses dan akan diproses jika semua berkas persyaratannya telah mereka lengkapi.

Selain itu juga ada PNS yang telah menerima izin belajar pada program studi yang berakreditasi C dengan ketentuan harus mempernaharui izin belajar tersebut jika menjelang ia menyelesaikan pendidikan akreditasi prodi naik ke B, berikut data yang penulis dapatkan:

Tabel 1.3
PNS yang memperoleh izin belajar pada program studi yang berakreditasi C pada Tahun 2014

No	Instansi	Pendidikan Terakhir	Universitas	Program Studi
1	UPT. RS Petala Bumi Dinas Kesehatan Provinsi Riau	D-III Kebidanan Politeknik Kesehatan Riau	STIKes Tuanku Tambusai Pekanbaru	D-IV Kebidanan
2	Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau	D-III Keperawatan Muhammadiyah Riau	STIKes Payung Negeri Pekanbaru	S-1 Ilmu Keperawatan
3	RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	D-III Analisis Kesehatan , Akademi Analisis Kesehatan Perintis Padang	STIKes Perintis Sumatera Barat	D-IV Analis Kesehatan

Sumber : *Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2017*

Pelanggaran terhadap kebijakan atau peraturan mengenai syarat dan ketentuan terkait pemberian izin belajar yang telah di buat terlihat dari masih banyaknya PNS yang tidak disiplin dalam pengajuan izin belajar serta adanya PNS yang memperoleh izin belajar pada program studi yang berakreditasi C, sehingga menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Ketidak disiplin PNS tersebut barangkali dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya kurangnya komunikasi, kurangnya pengetahuan dan



sebagainya. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkat judul **“Implementasi Izin Belajar PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau”**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pemahaman dan analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan rumusan masalah:

1. Bagaimana Implementasi izin belajar PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Pergub Riau No 02 Tahun 2015 ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi izin belajar PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Pergub Riau No 02 Tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisa

1. Implementasi izin belajar PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Pergub Riau No 02 Tahun 2015
2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi izin belajar PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Pergub Riau No 02 Tahun 2015

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dari segi keilmuan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai penambahan data dan referensi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau
2. Dari segi pengetahuan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi PNS yang hendak melanjutkan pendidikan khususnya di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan di Lingkungan UIN SUSKA Riau pada umumnya dan PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau pada umumnya.
3. Dari segi praktik hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembandingan dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya atau pihak yang berminat untuk melakukan studi lebih luas dan mendalam mengenai proses penerbitan izin belajar dan tugas belajar PNS di Lingkungan Provinsi Riau.
4. Dari segi empiris yang diperoleh dari penelitian ini sebagai bahan masukan dan referensi bagi pemerintah guna mengetahui dan menelaah seberapa persen keberhasilan dari implementasi kebijakan itu dan apa saja kelemahan atau kendala yang dihadapi

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisikan landasan teoritis yang mendukung penelitian, seperti teori kebijakan publik, implementasi peraturan, izin belajar, peran pendidikan, sumber daya manusia, dan PNS serta berisi penelitian terdahulu, pandangan islam, definisi konsep, variabel penelitian dan konsep operasional.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilaksanakan, yang berisi tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, informan penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan gambaran umum tentang Provinsi Riau, dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, yang berisikan sejarah dan visi misi Provinsi Riau dan BKD, serta pembagian tugas seluruh bagian yang ada di BKD Provinsi Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang hasil wawancara penulis dengan informan penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan masukan bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

